

Surat Kabar : Kompas

Tgl/Bln/Thn : 3 Desember 2012

Subyek : Hutan

Halaman : 22

Hutan Produksi Hancur

Jambi, Kompas - PT Permata Energy Resources kedapatan sedang membuka jalan angkut batubara tanpa izin dalam kawasan hutan produksi di Desa Pematang Tembesu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Namun, seluruh barang bukti hasil sitaan tidak bisa diangkut ke Kota Jambi.

Kepala BKSDA Jambi Tri Siswo mengatakan, Minggu (2/12), seluruh alat berat yang tengah beroperasi ditemukan tim gabungan sejak Kamis dalam kawasan hutan produksi kelompok Sengkati Batanghari. Pembukaan jalan dengan alat berat telah mencapai panjang 4,5 kilometer dan lebar sekitar 12 meter. Pembangunannya sudah hampir 8 bulan, dengan tujuan sebagai akses distribusi alternatif angkutan batubara dari sentra tambang di Kabupaten Bungo menuju Pelabuhan Dagang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Setelah menghentikan aktivitas perusahaan, pihak BKSDA berencana mengangkut hasil sitaan itu ke Kota Jambi. Namun, diduga akibat kuatnya tekanan dari sejumlah oknum penegak hukum, pihaknya kesulitan mengangkut alat-alat bukti itu. Seluruh alat bukti semestinya diangkut ke Lapangan Polda Jambi atau markas BKSDA di Jambi.

”Saya langsung lapor Menteri Kehutanan mengenai kendala ini. Menhut kemudian mengirim surat perintah pada Jumat agar seluruh sitaan itu dibawa ke Kota Jambi agar mempermudah proses penyidikan,” ujar Tri Siswo.

Sabtu sore, seluruh barang bukti belum juga dapat diangkut ke Kota Jambi. Selain itu, pemilik alat berat diduga melarikan diri setelah mengetahui kedatangan tim ke kawasan hutan itu.

Tim akhirnya mengamankan 11 alat berat ke Kepolisian Sektor Tungkal Ulu. ”Proses penyidikan tetap berjalan, hanya saja barang bukti tidak dibawa ke Jambi,” jelasnya.

Menurut Tri, dengan gagal dibawanya alat bukti ke Kota Jambi dapat memperlambat proses penyidikan. Dalam pemeriksaan saksi-saksi, penyidik butuh mencocokkan secara langsung keterangan saksi dan barang bukti, sementara keberadaan barang bukti cukup jauh dari lokasi penyidikan.

Menurut Kepala Polisi Hutan BKSDA Jambi Krismanko Padang, aktivitas tersebut dihentikan karena berlangsung dalam kawasan hutan produksi. Pembukaan jalan alternatif batubara ini dilakukan perusahaan tanpa seizin Kementerian Kehutanan. Lokasi jalan di sejumlah titik berada pada kawasan hutan produksi kelompok hutan Sengkati Batanghari.